

## **MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA MEDAN**

**Rahmat Hidayat**

Universitas Al Wasliyah Jl. Garu II 93 Kel. Harjosari i Medan Sumatera Utara

Email: [rahmatma\\_26@yahoo.co.id](mailto:rahmatma_26@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan menggambarkan sisi lain dari manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam di Kota Medan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Pengembangan manajemen tersebut, didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Oleh karena itu, *output* pendidikan menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah mulai kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Manajemen, Mutu, dan Madrasah

### **Abstract**

*This paper aims to describe the other side of the management quality improvement Islamic educational institutions in the city of Medan. Management of school based quality improvement is a new alternative in the management of education that stresses the independence and creativity of school. The management development, designed to improve the ability of school and communities in managing change in relation to the overall goal of education, policy, strategic planning, curriculum initiatives that have been determined by the government and education authorities. Therefore, the output of education require changes in attitudes and behavior of all components of the school began to principals, teachers and personnel or administrative staff, including parents and the community in looking, understanding, helpful as well as observers who carry out monitoring and evaluation in the management of the school concerned supported by a management information system that presentatif and valid. The end of all that is addressed to the success of the school to set up a quality education for the community.*

**Keywords:** Management, Quality, and School

## Pendahuluan

Pendidikan sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan peradaban Islam dan mencapai kejayaan umat Islam. Dilihat dari objek formalnya, pendidikan menjadi sarana kemampuan manusia untuk dibahas dan dikembangkan. Dalam pengalaman historis, tidak ada satu negara manapun yang mampu mencapai kemajuan yang hakiki tanpa didukung penyempurnaan pendidikan. Negara-negara Eropa yang terkenal sebagai kawasan negara-negara yang maju itu sebenarnya sebagai akibat dari pembangunan pendidikannya. Pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Artinya jika pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan "Manusia" yang berkualitas lahir batin. Otomatis bangsa tersebut akan maju, damai dan tetram. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang disegala bidang.

Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia. Islam memandang bahwa pembinaan sumberdaya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri, dengan demikian Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumberdaya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman.

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Untuk melakukan hal tersebut, peranan manajemen pendidikan sangat signifikan untuk menciptakan sekolah atau madrasah yang bermutu.

Lulusan bermutu merupakan SDM yang kita harapkan bersumber dari sekolah atau madrasah yang bermutu (efektif). Sudah siapkah sistem pendidikan kita untuk menetaskan mutu SDM yang mampu berkompetisi secara profesional dengan bangsa lain? Sebelum kita melangkah kesana dunia pendidikan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbaikan manajemen pendidikan sekolah atau madrasah;
2. Persediaan tenaga kependidikan yang professional;
3. Perubahan budaya sekolah/madrasah (visi, misi, tujuan dan nilai);
4. Peningkatan pembiayaan pendidikan;
5. Pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.

Apabila diamati secara mendalam, ada banyak faktor yang membuat kualitas madrasah rendah. Di antara faktor tersebut adalah kulaitas pengelola, sistem feodalisme, kondisi kultur masyarakat, kebijakan politik Negara, dan terlalu banyak beban yang harus dijalani siswa (Mujamil Qomar, 2010: 81). Pengelola atau pemimpin lembaga pendidikan memang memiliki posisi dan fungsi strategis selaku pengendali lembaga tersebut. Mereka memiliki *political power* (kekuasaan politis), suatu kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para guru.

Melalui kekuasaan itu, mereka memiliki kewenangan untuk mengadakan pembaruan. Apalagi jika kewenangan itu didukung dengan *political will* (kehendak politis) atau *good will* (kehendak baik) dari para pemimpin. Oleh karena itu, wajar sekali terjadi ketika suatu madrasah mengalami kemunduran maka kepala madrasah yang banyak mendapat keritikan. M. Arifin menegaskan bahwa titik lemah madrasah, pada semua jenjang, terletak pada tenaga pengelolanya, karena mereka kurang berorientasi pada profesionalisme. Meskipun demikian, tidak bisa dikatakan bahwa para guru dan tenaga administrative di madrasah negeri saat ini hanyalah kaum amatir yang menangani madrasah sambil lalu (M. Arifin, 1991: 10). Perilaku pemimpin atau pengelola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maju mundurnya sebuah madrasah. Perilaku positif dan proaktif dapat mendukung kemajuan madrasah. Sebaliknya, perilaku negative dan kontraproduktif justru menghambat kemajuan. Perilaku negatif ini terkait dengan tradisi kurang baik yang berlangsung dan berkembang di suatu madrasah.

Praktik manajemen di madrasah sering menggunakan model manajemen tradisional, yaitu model manajemen peternalistik atau feodalistik. Dominasi senioritas jelas mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas dan inovasi dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi ini mengarah pada penilaian negative, sehingga muncul kesan bahwa meluruskan atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap sebagai sikap *su' al-adab* (tabiat jelek) (Raharjo, 2002: 229).

Anggapan demikian sebenarnya merupakan pengaruh budaya local, bukan pengaruh ajaran agama. Islam memang mengajarkan kode etik dalam pergaulan antara orangtua dan muda. Kalangan muda mengormati yang tua sedangkan yang tua mengasihi yang muda. Namun tidak ada larangan untuk meluruskan kesalahan orang tua, bahkan dianjurkan. Konsep Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar tidak pernah dibatasi pada kalangan tertentu. Demikian juga untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran (*wa tawashau bi al-haq wa tawashau bi al-shabr*) sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ashr yang juga tidak terbatas pada kalangan tertentu. Jadi, kecemburuan senior terhadap teguran junior tidak lebih merupakan murni pengaruh budaya local yang justru akan menghambat dinamika pendidikan.

Selanjutnya, kondisi kultur di luar madrasah juga mempengaruhi kualitas madrasah. Kondisi ini bisa berupa pandangan atau penilaian masyarakat terhadap madrasah. Selama ini madrasah dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas ekonomi, tidak bermutu, hanya mengajarkan agama semata, jurusan akhirat, tempat penampungan anak-anak orang miskin, bersistem kolot, dan tidak bisa melanjutkan ke sekolah umum atau perguruan tinggi umum negeri (Mujamil Qomar, 2010: 83).

Semua anggapan tersebut merupakan hal yang salah kaprah karena tidak berdasar. Meskipun demikian, anggapan itu tetap bertahan mempengaruhi masyarakat umum, yang selama ini memang jauh dari kehidupan madrasah. Mereka terpengaruh lantaran tidak mengetahui realitas yang sebenarnya. Tentu saja, kondisi eksternal madrasah yang demikian kurang menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah (Mujamil Qomar, 2002: 344-345). Ada banyak faktor lain yang juga menyebabkan mutu

madrasah lemah, termasuk masalah yang berhubungan dengan beban yang harus dijalani siswa. Beban yang diwajibkan pada siswa madrasah jauh lebih berat daripada beban siswa sekolah umum. Siswa madrasah wajib mempelajari semua mata pelajaran siswa disekolah umum, plus pelajaran rumpun agama yang meliputi bahasa Arab, Alquran-Hadis, Aqidah-Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Apalagi madrasah yang ada dalam pesantren, beban siswa lebih berat lagi. Karena, disamping siswa mengikuti pelajaran di madrasah juga mengikuti pelajaran di pesantren.

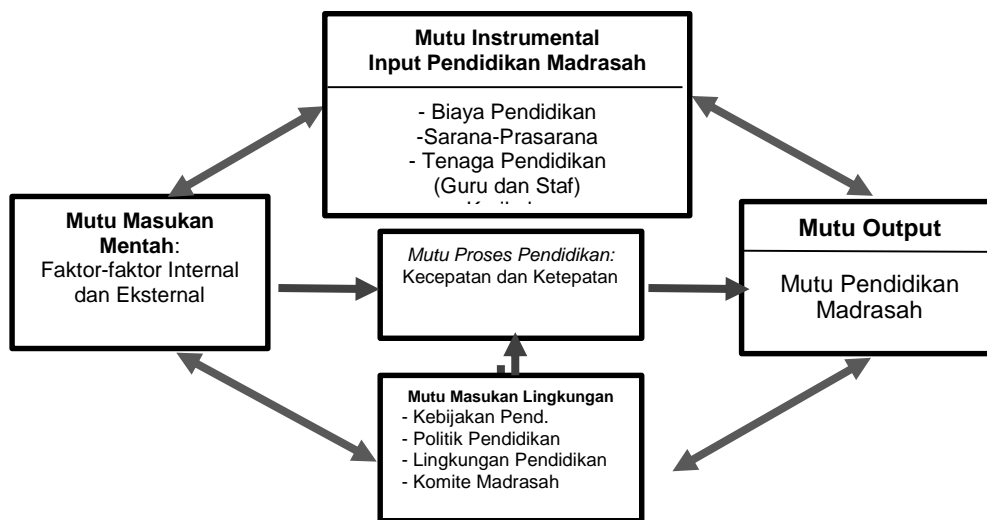
Pada bagian lain, kita harus menyadari bahwa potensi siswa madrasah rata-rata merupakan kelas menengah ke bawah. Secara intelektual kemampuan mereka lemah, sebab biasanya siswa yang memiliki perestasi baik cenderung melanjutkan ke sekolah umum. Secara ekonomi, posisi mereka juga pada kelas menengah kebawah. Demikian juga secara social, mereka berasal dari kalangan masyarakat biasa (*grass root*), potensi siswa madrasah rata-rata merupakan akumulasi kelas menengah kebawah baik secara intelektual, ekonomi maupun sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa kehadiran mereka di Madrasah telah membawa sejumlah problem yang harus diselesaikan karena ini juga berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran (Mujamil Qomar, 2010: 85).

Selanjutnya, dibandingkan sekolah umum, guru, sarana dan prasarana, serta peralatan pembelajaran di madrasah juga masih tertinggal. Guru-guru di madrasah masih banyak yang kurang professional, baik dalam tingkat pendidikan maupun keahliannya. Masih banyak guru madrasah yang mengampu mata pelajaran yang bukan keahliannya. Demikian juga dengan sarana prasarana, perpustakaan, serta laboratorium, yang mestinya menjadi jantung madrasah, ternyata tidak memadai, bahkan terkadang tidak ada. Apalagi yang berhubungan dengan alat pembelajaran seperti OHP, *laptop*, LCD, dan sebagainya sangat terbatas. Bahkan, madrasah tertentu tidak memilikinya. Kekurangan pada tiga komponen ini berdampak negative pada proses pembelajaran.

Apalagi kita menggunakan rumus *input – proses – output* untuk mengukur suatu pendidikan, maka di madrasah ada masalah yang harus dipecahkan. Bila *input*-nya baik, prosesnya baik, maka bisa dipastikan *output*-nya juga baik. Akan tetapi, bila *input*-nya lemah, prosesnya jelek, maka *output*-nya juga lemah. Kondisi kedua ini menggambarkan keadaan di madrasah pada umumnya, yang berarti ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Walau bagaimanapun madrasah – terlepas dengan segala kekurangannya - telah memberikan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika madrasah ingin berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang bermutu dan unggul di Indonesia, paling tidak madrasah harus memenuhi delapan standard pendidikan nasional. Adapun standar-standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan dan, 8) standar penilaian pendidikan.

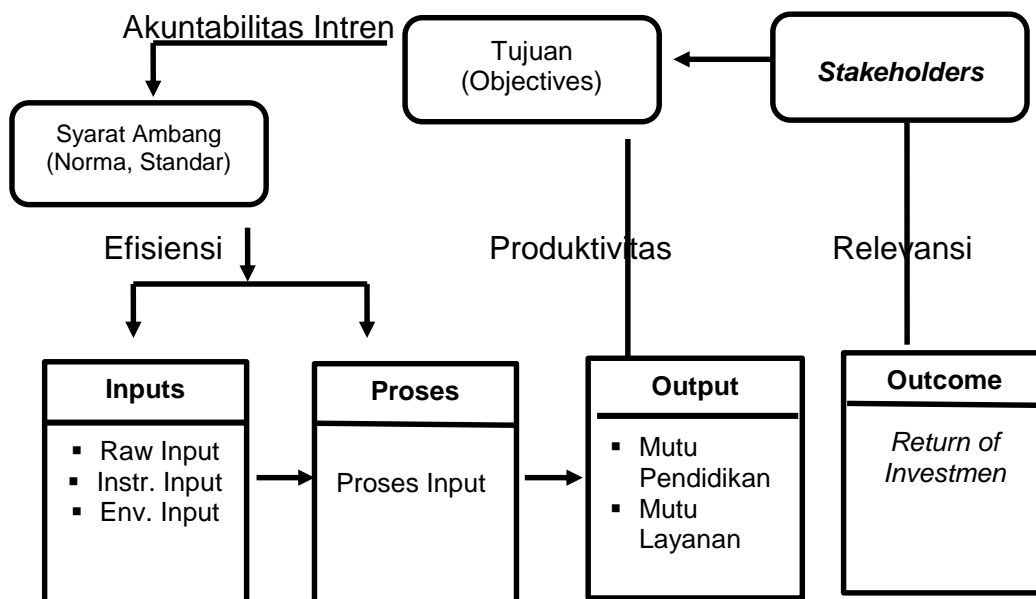
Mutu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan muncul dihadapan para guru, karyawan dan kepala sekolah. Mutu harus direncanakan. Karena itu ada trilogi mutu, yaitu perencanaan mutu, pengawasan mutu, dan perbaikan mutu. Bagaimanapun juga, mutu terpadu adalah sesuatu yang diraih dengan berkelanjutan. Total atau terpadu berarti setiap orang dalam organisasi dilibatkan dalam mencapai produk yang diharapkan dengan pelayan terhadap pelanggan serta proses kerja atau kontribusi kegiatan (tugas) terhadap keberhasilan yang menyeluruh atau terpadu. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah (Otda) adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peranserta atau partisipasi masyarakat, dan meningkatkan sumber-sumber dana dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral pendidikan nasional selain isu-isu pemerataan, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1989 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diikuti dengan pemberlakuan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu. Pemahaman secara menyeluruh terhadap konsep mutu pendidikan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Variabel-variabel Mutu Pendidikan

Sesuai dengan gambar di atas, peneliti lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan berbasis madrasah pada Madrasah Aliyah untuk pengembangan mental, akhlak, dan intelektual peserta didik, baik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat maupun untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mencapai mutu pendidikan madrasah yang baik tentu saja diperlukan serangkaian kegiatan sekolah yang bermutu. Abin Syamsuddin menggambarkan keterkaitan antarfaktor yang saling berinterelasi dan saling mempengaruhi dalam analisis sistem pendidikan, yakni sebagai berikut:



Sumber: Abin Syamsuddin (2000: 17).

Gambar 1.2. Analisis Sistem Pendidikan

Sesuai dengan konsep-konsep yang mendasari analisis sistem pendidikan sebagaimana diilustrasikan di atas, data empirik tentang pengembangan pendidikan pada level madrasah khususnya di Kota Medan menunjukkan perlunya penanganan yang lebih optimal untuk mencapai mutu yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan yang diselenggarakan lembaga-lembaga madrasah di Kota Medan mengalami perkembangan yang demikian pesat, terutama di daerah-daerah perkotaan yang kehidupan keagamaannya masih sangat baik.

Berdasarkan hasil-hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Diknas dan Depag Propinsi Sumatera Utara mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada lembaga-lembaga madrasah di Kota Medan harus ditingkatkan mutunya sehingga mampu merespon baik tuntutan-tuntutan otonomi daerah maupun tuntutan-tuntutan kehidupan yang lebih luas.

## Pembahasan

### 1. Manajemen Pendidikan

Manajemen dapat diartikan sebagai proses menggunakan dan atau menggerakkan sumber daya manusia, modal dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu (Kamarulzaman, 2005: 431). Sementara itu George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 1973: 4). Mondy & Premeaux mengemukakan manajemen adalah cara-cara atau aktivitas tertentu agar semua anggota dapat bekerja sesuai dengan prosedur, pembagian kerja, dan tanggung jawab yang diawasi untuk mencapai tujuan bersama (Wayne, 1988: 4).

Pendidikan adalah setiap proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge acquisition*), mengembangkan kemampuan/keterampilan (*skills developments*) sikap atau mengubah sikap (*attitude*

*change*). Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Pendidikan mempunyai fungsi sosial and individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkannya untuk menghadapi masa depan (penga-laman baru). Proses pendidikan dapat berlangsung secara formal seperti yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga berlangsung secara informal lewat berbagai kontak dengan media komunikasi seperti buku, surat kabar, majalah, TV, radio dan sebagainya. Suatu sistem pendidikan bukan hanya terdiri dari lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi), tetapi juga meliputi perpustakaan, museum, penerbit, dan berbagai agen yang melakukan transmisi pengetahuan dan keterampilan.

Jika pengertian Manajemen Pendidikan ini diterapkan pada usaha pendidikan maka sudah termuat hal-hal yang menjadi objek pengelolaan atau pengaturan. Lebih tepatnya, definisi Manajemen Pendidikan adalah sebagai berikut: Manajemen Pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan definisi tersebut pada usaha pendidikan yang terjadi dalam sebuah organisasi, maka definisi Manajemen Pendidikan selengkapnya adalah sebagai berikut: Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. Lebih lanjut Mulyani A. Nurhadi menekankan adanya ciri-ciri atau pengertian Manajemen Pendidikan yang terkandung dalam definisi tersebut sebagai berikut:

1. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia.
2. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ; tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa.
3. Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan itu.
4. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum (skala tujuan umum) dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan (skala tujuan khusus).
5. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dari pengertian di atas, manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dsb untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Tujuan pendidikan sebagaimana tertuang pada UU Nomor 2 tahun 1989 pasal 4, antara lain dirumuskan: "Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Sasaran pendidikan secara makro sebagaimana yang terdapat dalam lembaga-lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan pada beberapa hal, antara lain akuisisi pengetahuan (sasaran kognitif), pengembangan keterampilan/kemampuan (sasaran motorik) dan pembentukan sikap (sasaran afektif). Sasaran makro ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk sasaran mikro yang dapat diukur secara rinci dan spesifik berupa apa yang diharapkan dari hasil belajar mengajar. Salah satu sasaran yang dapat diukur untuk sasaran kognitif adalah nilai hasil akhir belajar (NEM) dan perankingan sebagai implikasi dari NEM. Untuk sasaran motorik, terkait dengan apa yang telah dihasilkan oleh siswa, sedangkan untuk sasaran afektif, terkait dengan perubahan sikap/perilaku siswa setelah proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, pendidikan pun memerlukan adanya manajemen pendidikan yang berupaya mengkoordinasikan semua elemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana pada manajemen secara umum, manajemen pendidikan meliputi empat hal pokok, yaitu perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggiatan pendidikan, dan pengendalian atau pengawasan pendidikan. Secara umum terdapat sepuluh komponen utama pendidikan, yaitu: peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, paket instruksi pendidikan, metode pengajaran (dalam proses belajar mengajar), kurikulum pendidikan, alat instruksi & alat penolong instruksi, fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan, dan evaluasi pendidikan.

## 2. Mutu Pendidikan

Istilah "mutu" merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Inggris, yakni *quality*, artinya, *goodness or worth*. Dengan demikian, secara definitif istilah mutu dapat diartikan sebagai kebaikan atau nilai. Pada mulanya istilah mutu banyak digunakan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam organisasi industri, dimana mutu diartikan sebagai karakteristik produk/jasa yang ditentukan oleh pihak pelanggan, dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan secara berkesinambungan. Dalam konteks penelitian ini, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan MAN memberikan layanan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, mutu pendidikan MAN adalah kemampuan MAN memenuhi harapan pihak *customers* atau *stakeholders* (masyarakat Islam pada umumnya).

Dalam rangka umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan

pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan* dan *hasil pendidikan*. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UAS atau UN). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan.

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasi kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekwensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.

Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan madrasah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro; Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan madrasah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan madrasah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena

pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasi secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori *effective school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut; (a) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (b) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (c) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (d) adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (e) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (f) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan (g) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Ada empat hal yang terkait

dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu; (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol semua sumberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal - hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan - tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.

### 3. Kerangka Kerja dalam Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain sebagai berikut:

**Sumber daya;** sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk: (a) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (b) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (c) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

**Pertanggung-jawaban (*accountability*);** sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (*accountability*) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasi-kannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.

**Kurikulum;** berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (*content*) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki

kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu: (a) pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa; (b) bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada, dan (c) pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progres pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

**Personil sekolah:** sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat. Konsekwensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan untuk:

- a. Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya didalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai kebutuhan untuk peningkatan mutu.
- c. Menyajikan laporan terhadap hasil dan performannya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggung jawaban kepada *stake-holders*).

Uraian tersebut di atas memberikan wawasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Dengan kata lain, didalam masyarakat yang kompleks seperti sekarang dimana berbagai perubahan yang telah membawa kepada perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini dan disadari bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara tepat dan cepat dapat merespon perubahan keinginan masyarakat tersebut. Kondisi tersebut, telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang dikelola secara efektiflah (dengan manajemen yang

berbasis sekolah) yang mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan.

Institusi pusat memiliki peran yang penting, tetapi harus mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi dari sistem pendidikan secara keseluruhan, harapan dan standar bagi siswa untuk belajar dan menyediakan dukungan komponen pendidikan yang relatif baku atau standar minimal. Konsep ini menempatkan pemerintah dan otoritas pendidikan lainnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan kunci dasar tujuan dan kebijakan pendidikan dan memberdayakan secara bersama-sama sekolah dan masyarakat untuk bekerja di dalam kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan secara nasional dalam rangka menyajikan sebuah proses pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai untuk setiap komunitas masyarakat.

Jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa isu desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus menyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan).

Sementara itu pendanaan walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentukan, kebutuhan diidentifikasi, kebijakan diformulasikan dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pendidikan dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosioekonomik masyarakat, maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu walaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu mengenai apa-apa yang boleh/tidak boleh dilakukan. Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah-sekolah harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (*center for excellence*) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar dapat menentukan visi dan misi untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

#### **4. Standar Mutu Pendidikan di Indonesia**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 3 dan 4).

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2007) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu standar pendidikan juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang bermutu.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan perlunya pemerintah mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional yang mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, maka disusun Undang-Undang yang khusus mengatur masalah pendidikan. Pada zaman Orde Baru UU pendidikan disusun pada tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal. Di dalamnya mencakup dari mulai dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk Wajib Belajar, Penjamin kualitas pendidikan serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang ini secara tegas disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan pendidikan dalam tataran praktis harus mengacu pada dua landasan tersebut. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3).

Dengan memperhatikan pasal tersebut nampak jelas bahwa segala upaya pendidikan harus merupakan kegiatan yang dapat mencapai tujuan tersebut, sudah tentu hal itu memerlukan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat menjadikan pencapaian tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam rangka melaksanakan dan menjabarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan peraturan ini agar penyelenggaraan pendidikan dapat sesuai dengan yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 yakni pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk itu diperlukan terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada tataran meso dan mikro, dalam hubungan ini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dapat dipandang sebagai upaya ke arah pencapaian hal tersebut. Suatu hal yang cukup penting dalam PP ini adalah perlunya dibentuk suatu Badan yang bernama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan yang

menentukan standar dan kriteria pencapaian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada dasarnya hanya merupakan standar umum penyelenggaraan pendidikan, sehingga diperlukan operasionalisasi dalam berbagai aspek pendidikan. Hal ini tercantum dalam PP tersebut tentang lingkup standar yang harus ada seperti standar isi, standar proses, standar lulusan dan standar lainnya, di samping masalah standarisasi penyelenggaraan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. Adapun secara lebih jelas, standar-standar yang harus menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup: 1) Standar isi, 2) Standar proses, 3) Standar kompetensi lulusan, 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) Standar sarana dan prasarana, 6) Standar pengelolaan, 7) Standar pembiayaan, dan, 8) Standar penilaian pendidikan.

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dalam hal tersebut di atas, sampai saat ini yang telah terbit petunjuk pelaksanaan terhadap standar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, Peraturan Menteri

Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sementara standar lainnya masih dalam proses.

Kriteria Penentuan kedelapan standar di atas ditetapkan oleh Lembaga Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan lembaga independen terlepas dari campur tangan secara langsung ataupun tidak dari pemerintah, yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar pendidikan nasional.

### **Simpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Untuk melakukan hal tersebut, peranan manajemen pendidikan sangat signifikan dalam menciptakan sekolah atau madrasah yang bermutu.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya di Medan pada umumnya belum memenuhi standar minimal yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan, standar penilaian pendidikan. Hal tersebut, diakibatkan tiga hal, belum maksimalnya pemerataan pendidikan, adanya ketidaksesuaian lembaga pendidikan Islam dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan (materialistis), sering berubahnya kebijakan yang bersifat reaktif tidak solutif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam membutuhkan komitmen yang kuat mulai dari hulu sampai hilir dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi mutu pendidikan khususnya pendidikan tingkat Aliyah.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kamarulzaman, AKA dan M. Dahlan Y. AlBarry. 2005. *Kamus Ilmiah Terapan*, Yogyakarta: Absolut
- Makmun, Abin Syamsuddin. 2000. *Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Qomar, Mujamil. 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, Jakarta: Erlangga
- Qomar, Mujamil. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga

- Qomar, Mujamil. 2002. *Manajemen Madrasah dalam Menatap Masa Depan: Sebuah Upaya Memberdayakan Pengelola Madrasah*, Jurnal Ilmiah Tarbiyah, Vol. 23, No. 8, Juni 2002.
- Rahardjo. 2002. "Madrasah Sebagai the Centre of Excellence", dalam Ismail SM, Nurul Huda dan Abdul Kholiq, (Ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Terry, George R. 1973. *The Principles of Management*, Illionis: Richard D. Irwin Inc
- Terry, George R., dan Leslie W. Rue. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A Ticoalu. Cet. Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara
- Wayne, Mondy R. & Premeaux Shane R. (1988). *Management: Concepts, Practices an Skills*, Massachussetts: Allyn and Bacon Inc